BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Adanya Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sangat membantu pertumbuhan perekonomian Indonesia. Menurut data Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia pada tahun 2023, kontribusi UMKM terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional mencapai 61,07. Sektor UMKM juga memiliki daya serap lebih dari 97% tenaga kerja di Indonesia, sehingga UMKM mampu menjadi salah satu pengurangan pengangguran terbesar nasional. Kontribusi yang sangat besar tersebut menunjukkan bahwa penguatan dan pengembangan UMKM perlu terus dilakukan agar manfaatnya terhadap perekonomian nasional dapat semakin meningkat. Maka dengan itu, UMKM menjadi salah satu fondasi utama yang mendukung pertumbuhan dan stabilitas perekonomian nasional (Auliah & Kaukab, 2019).

Meskipun begitu masih terdapat berbagai permasalahan pada UMKM, terutama dalam menyusun laporan keuangan. Sampai saat ini, masih tergolong banyak pelaku usaha yang belum menyusun laporan keuangan sesuai standar akuntansi. Berdasarkan data Dinas Koperasi dan UKM Kota Lhokseumawe tahun 2025, UMKM yang tercatat aktif di wilayah ini yaitu sebanyak 6.897 UMKM. Namun diperkirakan hanya sekitar 10% UMKM yang telah membuat laporan keuangan sesuai standar.

Tabel 1.1

Perkiraan Adopsi SAK EMKM oleh UMKM di Kota Lhokseumawe 2025

Kategori	Jumlah UMKM	Persentase (%)
Telah Menerapkan SAK EMKM	690	10%
Belum Menerapkan SAK EMKM	6.207	90%
Total	**6.897**	**100%**

Sumber: Diolah oleh penulis berdasarkan data dari Disperindagkop & UKM Kota Lhokseumawe, 2025.

Data yang menjadi dasar penyajian Tabel 1.1 bersumber dari jumlah populasi UMKM yang dihimpun oleh penulis melalui Dinas Koperasi dan UKM Kota Lhokseumawe pada tahun 2025. Berdasarkan data tersebut, tercatat sebanyak 6.897 UMKM masih aktif menjalankan kegiatan usahanya. Persentase penerapan SAK EMKM sebesar 10% mengacu pada hasil penelitian Suhaila dan Tatik (2023). Dari penelitian tersebut yang dilakukan di Lhokseumawe mengungkapkan hanya 10 unit UMKM yang telah menyusun laporan keuangan sesuai SAK EMKM dari total sampel yaitu 89 UMKM.

Jika merujuk pada paparan dalam Tabel 1.1, dapat dilihat bahwa hampir seluruhnya UMKM di Kota Lhokseumawe belum menyusun laporan keuangan sesuai SAK EMKM, seperti masih terdapat banyak pelaku UMKM yang tidak atau belum melakukan pencatatan transaksi secara rutin dan konsisten, dan tidak memisahkan keuangan usaha dan keuangan pribadi. Sehingga keadaan seperti ini dapat membuat laporan keuangan yang dihasilkan tidak berkualitas. Situasi ini berpotensi menimbulkan kesulitan ketika pelaku UMKM memerlukan laporan keuangan sebagai persyaratan pengajuan pembiayaan kepada lembaga keuangan maupun untuk mengikuti berbagai program bantuan dari pemerintah.

Fungsi utama laporan keuangan adalah menyediakan gambaran menyeluruh mengenai kondisi finansial suatu entitas, yang meliputi informasi mengenai posisi keuangan, kinerja usaha, serta perubahan arus kas selama satu periode. Supaya informasi tersebut memiliki nilai guna, penyusunannya harus sesuai karakteristik yang ditetapkan dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK), yaitu keandalan, relevan, mudah dipahami dan dapat dibandingkan. Kualitas suatu laporan keuangan ditentukan oleh kemampuannya dalam menyajikan informasi yang bebas dari kesalahan material serta didukung oleh tingkat keandalan yang tinggi (Ratih dan Putri, 2010). Karakteristik tersebut menjadikan laporan keuangan sebagai sumber informasi yang akurat dan sebagai landasan yang kuat dalam proses pengambilan keputusan. Berdasarkan kondisi tersebut, pelaku UMKM membutuhkan pedoman penyusunan laporan keuangan yang disesuaikan dengan karakteristik kegiatan usahanya.

Informasi yang berkualitas dari laporan keuangan UMKM tidak terlepas oleh penggunaan standar akuntansi sebagai dasar dalam proses penyusunannya. SAK EMKM merupakan salah satu standar yang dikembangkan oleh IAI pada 1 Januari 2018 dengan mempertimbangkan keterbatasan dan karakteristik UMKM agar lebih mudah dipakai oleh pelaku usaha. Standar ini diterapkan untuk mendukung UMKM dalam menyusun laporan keuangan yang lebih sistematis tanpa mengesampingkan prinsip dan ketentuan akuntansi yang berlaku. Dalam standar ini, yang termasuk dalam laporan keuangan adalah laporan posisi keuangan, laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan. Menurut Wilfa dan Sagoro (2016), laporan keuangan berfungsi sebagai pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban.

Namun perkembangan standar akuntansi di Indonesia melahirkan perbedaan antara SAK EMKM dan SAK EP, sejak 1 Januari 2025. SAK EP memiliki cakupan yang lebih luas termasuk dalam penyajian laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, pengaturan instrumen keuangan dan aset tetap, sehingga lebih sesuai untuk kebutuhan pelaporan yang lebih kompleks. Sementara itu, SAK EMKM dibuat dengan ketentuan yang lebih sederhana agar sesuai dengan karakteristik transaksi UMKM, sehingga penerapannya lebih mudah dipraktikan. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa masing-masing standar disusun untuk memenuhi kebutuhan entitas yang berbeda sesuai dengan karakteristik kegiatan usahanya.

Selanjutnya, perencanaan pajak juga diperkirakan mempengaruhi kualitas laporan keuangan UMKM. Melalui perencanaan pajak, pelaku usaha dapat mengatur kewajiban perpajakannya secara efisien dengan tetap berada dalam batas ketentuan hukum yang berlaku. Akan tetapi, sebagian UMKM masih belum menjadikan aspek perpajakan sebagai bagian dari strategi pengelolaan keuangan karena pajak sering dipersepsikan hanya sebagai kewajiban yang meningkatkan biaya usaha. Selain itu, rendahnya pengetahuan terhadap aturan perpajakan dapat menyebabkan kesalahan dalam pelaksanaan kewajiban pajak. Sehingga dapat memengaruhi kualitas laporan keuangan yang dihasilkan.

Kemudian tingkat pendidikan pelaku usaha juga diperkirakan mempengaruhi penentuan kualitas laporan keuangan UMKM. Pendidikan berkontribusi dalam meningkatkan kemampuan seseorang dalam memperoleh berbagai pengetahuan, salah satunya dalam penyusunan laporan keuangan. Dengan demikian, tingkat pendidikan juga dianggap menjadi aspek penting dalam kualitas laporan keuangan.

Selain faktor-faktor yang telah dijelaskan sebelumnya, pemahaman akuntansi pelaku UMKM juga diperkirakan memiliki peran dalam memengaruhi kualitas laporan keuangan UMKM. Pemahaman akuntansi bukan hanya sebatas pada kemampuan mencatat transaksi, tetapi juga meliputi kemampuan mengklasifikasikan, mengolah, menganalisis, hingga menyajikan informasi keuangan secara tepat. Namun pemahaman terhadap konsep dan tahapan akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan standar dan mampu menggambarkan kondisi usaha secara tepat.

Penelitian mengenai kualitas laporan keuangan pada UMKM telah menjadi fokus berbagai studi yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Meskipun demikian, hasil yang diperoleh belum menunjukkan kesimpulan yang konsisten. Widyaningrum dan Purwanto (2020) menunjukkan bahwa penerapan SAK EMKM memberikan kontribusi positif terhadap kualitas laporan keuangan, namun untuk tingkat pendidikan tidak memiliki pengaruh signifikan. Berbeda dengan itu, Mujianti dan Anwar (2022) menemukan bahwa pemahaman akuntansi berpengaruh positif terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan. Sementara, Hijriyanah dan Yanti (2023) menegaskan pelatihan dan pengalaman pelaku UMKM memiliki pengaruh yang lebih kuat dibandingkan pendidikan formal dalam mendukung peningkatan kualitas laporan keuangan. Adanya temuan yang berbeda tersebut menunjukkan bahwa pengujian lebih lanjut masih diperlukan guna menguji pengaruh variabel-variabel tersebut pada lokasi serta objek penelitian yang berbeda.

Fenomena yang terjadi pada UMKM di Kota Lhokseumawe memperlihatkan bahwa pengelolaan keuangan masih memerlukan perhatian. Keadaan tersebut

tercermin dari informasi keuangan yang dihasilkan, yang pada beberapa kondisi belum sepenuhnya mampu mencerminkan keadaan usaha secara tepat dan komprehensif. Sehingga hal tersebut dapat menyebabkan pelaku UMKM mengalami kendala ketika membutuhkan laporan keuangan untuk memperoleh pembiayaan atau mengikuti program pemberdayaan yang diselenggarakan oleh pemerintah. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini dilaksanakan pada UMKM Kota Lhokseumawe dengan populasi sebanyak 2.862 UMKM.

Berdasarkan uraian sebelumnya, dapat dipahami bahwa banyak variabel yang saling mempengaruhi kualitas laporan keuangan UMKM. Berdasarkan berbagai permasalahan yang telah diuraikan, penulis menetapkan judul penelitian, yaitu **"Pengaruh Penerapan SAK EMKM, Perencanaan Pajak, Tingkat Pendidikan, dan Pemahaman Akuntansi Pelaku UMKM terhadap Kualitas Laporan Keuangan pada UMKM Kota Lhokseumawe."**

1.2 Perumusan Masalah Penelitian

1. Apakah Penerapan SAK EMKM Berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan UMKM Kota Lhokseumawe?
2. Apakah Perencanaan Pajak Berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan UMKM Kota Lhokseumawe?
3. Apakah Tingkat Pendidikan Berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan UMKM Kota Lhokseumawe?
4. Apakah Pemahaman Akuntansi Pelaku UMKM Berpengaruh Terhadap Kualitas Laporan Keuangan UMKM Kota Lhokseumawe?

1.3 Tujuan Masalah Penelitian

1. Untuk Mengetahui dan Menganalisis Bagaimana Pengaruh Penerapan SAK EMKM Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada UMKM Kota Lhokseumawe.
2. Untuk Mengetahui dan Menganalisis Bagaimana Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada UMKM Kota Lhokseumawe.
3. Untuk Mengetahui dan Menganalisis Bagaimana Pengaruh Tingkat Pendidikan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada UMKM Kota Lhokseumawe.
4. Untuk Mengetahui dan Menganalisis Bagaimana Pengaruh Pemahaman Akuntansi Pelaku UMKM Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada UMKM Kota Lhokseumawe.

1.4 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan berkontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, terutama berkaitan dengan faktor yang menjadi pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi UMKM, dengan adanya hasil penelitian ini bisa sebagai bahan evaluasi bagi pelaku UMKM dalam meningkatkan pemahaman mereka mengenai pentingnya penerapan SAK EMKM, perencanaan pajak, serta

pemahaman akuntansi dalam menyusun laporan keuangan yang berkualitas.

2. Bagi pemerintah dan regulator, bisa digunakan sebagai bahan pertimbangan ketika menyusun kebijakan, khususnya oleh pemerintah daerah dan instansi terkait. Sehingga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan di sektor UMKM.
3. Bagi Akademisi, bisa dimanfaatkan sebagai rujukan untuk peneliti selanjutnya, khususnya yang mengkaji kualitas laporan keuangan pada UMKM maupun topik lain yang memiliki keterkaitan. Selain itu bisa juga menjadi sumber tambahan referensi ilmiah dan mendukung pengembangan kurikulum akuntansi, terutama terkait penerapan SAK EMKM pada UMKM.